



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Didalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja harus mengacu kepada prinsip-prinsip good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis didukung 6 Enam indikator g, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberhasilan diatas 100 % atau melebihi target yang ditetapkan sebanyak ...
2. Keberhasilan 100 % atau sesuai target yang ditetapkan sebanyak 1 indikator n atau 25 % dari jumlah indikator sasaran

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin antara lain ;

Laporan ini disusun guna memenuhi Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang antara lain menyatakan bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja.

## **B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi**

### **∞ Kewenangan**

**Kewenangan** penyelenggaraan Pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, sebagai mana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin yang merupakan Satuan Perangkat Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sekarang ini tidak hanya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, tetapi juga sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014, Sat Pol PP Kabupaten juga Menaungi Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) yang sebelumnya berada dibawah naungan Kesatuan Bangsa dan Politik ( BPBD Kesbangpol

### **∞ Tugas Pokok**

Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Banyuasin dibentuk 3 Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai **tugas pokok** yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dan Perlindungan Masyarakat .



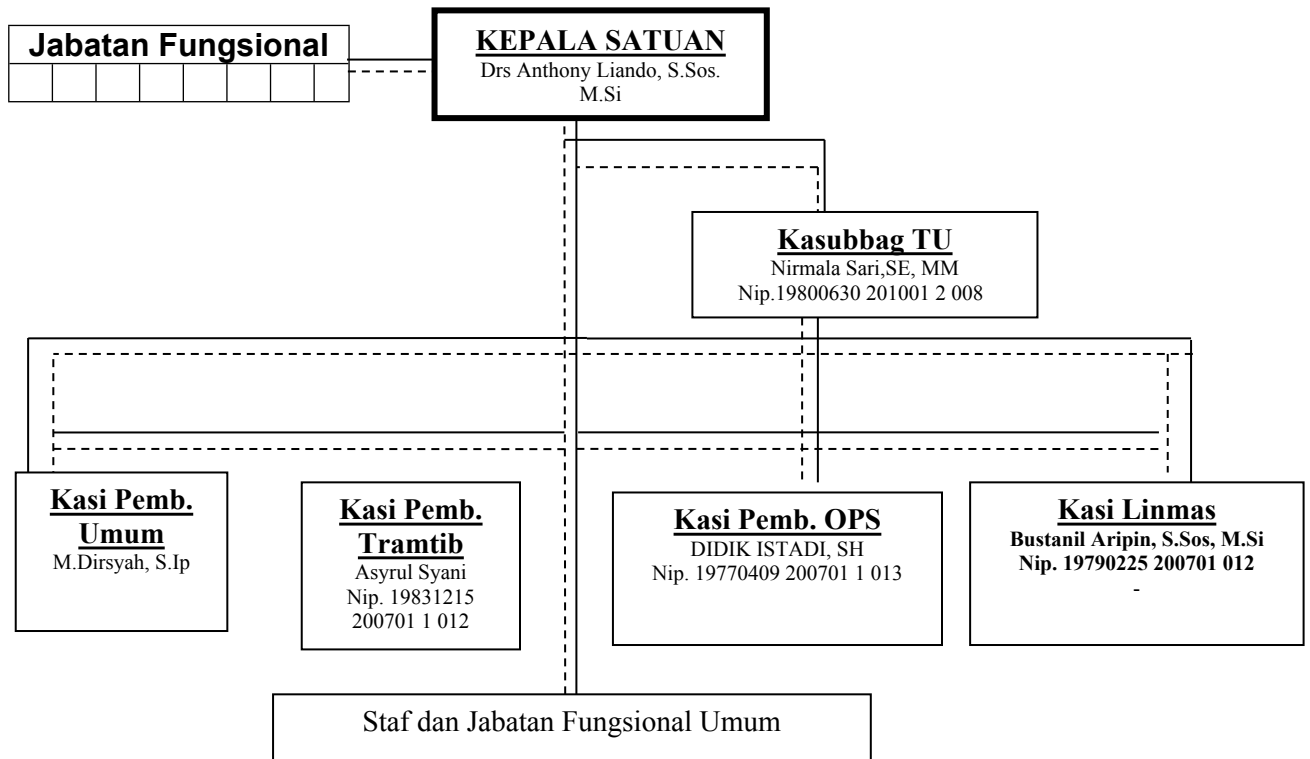
Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Pelaksanaan layanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perda dan keputusan kepala daerah serta pelaksanaan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang lebih memadai sesuai dengan tuntutan kinerja.
6. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perda dan keputusan kepala daerah.

#### ∞ **Struktur Organisasi**

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsinya maka **Struktur Organisasi** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2014 , tersusun dan terstruktur dalam beberapa jenjang jabatan Struktural yang dapat diringkas secara sederhana dalam bagan sebagai berikut :

### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUASIN (Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2016)**



Keterangan :

1. ——— Garis Komando
2. - - - - - Garis Koordinasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sat Pol-PP Kabupaten Banyuasin , Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Banyuasin No 2 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 TAHUN 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 625 Tahun Tugas dan Fungsi Kabupaten Banyuasin yang terdiri :

1. Kepala Satuan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kasi Pembinaan Operasi
4. Kasi Pembinaan Trantib
5. Kasi Pembinaan Umum



## 6. Kasi Perlindungan Masyarakat ( LINMAS)

### C. Isu Strategis

Dalam mewujudkan menjadi Kawasan Mandiri dan Berdaya Saing 2015. Kabupaten telah menetapkan beberapa kebijakan yaitu Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6%, Ketahanan Pangan melalui peningkatan produksi gabah dengan target sebesar 914.893,36 Ton, Menurunkan Angka Kemiskinan sebesar 12%, Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dalam masyarakat dan Memantapkan Jalannya penyelenggaraan pemerintah tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembangunan 100 Unit gedung perangkat desa/kelurahan/kecamatan. Namun untuk mewujudkan target tersebut pastinya akan menemui berbagai permasalahan dan tantangan yang dapat diidentifikasi isu strategis yang meliputi :

#### 1. Kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kabupaten Banyuasin memiliki penduduk yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras dan agama sehingga rentan konflik dan perselisihan. Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menciptakan keamanan dan ketentraman lingkungan yang kondusif.

Selain itu juga upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) perlu ditingkatkan guna meningkatkan pendapatan daerah.

#### 2. Rendahnya kualitas SDM Aparat penegak Peraturan Pemerintah Guna menciptakan ketertiban dan ketentraman umum tentunya diperlukan Aparat penegak peraturan pemerintah yang handal dan tangguh. Pada saat ini Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin masih jauh dari cukup untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

### D. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ( Lkj ) Satuan Polisi Pamong Praja ( Sat-Pol PP ) Kabupaten Banyuasin tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara



dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( SAKIP ).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj ) memiliki dua fungsi Utama sekaligus. Pertama , Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada seluruh stakeholder. Kedua, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tahun 2016 adalah laporan kinerja tahun 2016 yang berisi pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong SKPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan good governance, karena LAPKIN merupakan dasar untuk pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2015
3. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pada periode yang akan datang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin.
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

#### **B. Perjanjian Kinerja**



## **A. Perjanjian Kinerja Tahun 2016**

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin telah membuat penetapan kinerja tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tahun 2016 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2016 ada sedikit perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2015. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2016 selengkapnya terdapat pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagaimana terlampir pada lampiran

2.1

( informasikan Perencanaan 5 tahun RS )

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Sat-Pol PP Kabupaten Banyuasin Tahun 2016**



Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Perayuran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin telah menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin Nomor 017/03/POL-PP Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin.

Pada Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yaitu :

No	IKU	Sasaran	
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	1	Meningkatkan Ketertiban , Keamanan, dan Kenyamanan Dalam Masyarakat
2	Cakupan Patroli Petugas Sat Pol PP		
3.	Penegakkan PERDA	2.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam Mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
4.	Tingkat Sumber Daya Manusia Personil Sat Pol PP Terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya	3.	Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya
5.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan ( K3 ) di Kabupaten.	4	Meningkatkan Kualitas kemampuan aparaturnya Sat-Pol PP Meningkatkan Kualitas kemampuan aparaturnya Sat-Pol PP
6.	Cakupan Rasio Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) di Kabupaten		





Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja dan sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa sekarang .

Penetapan Indikator Utama (IKU) merupakan ukuran yang memberikan informasi apakah SKPD yang bersangkutan sudah berhasil atau belum berhasil dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran 1: Meningkatkan Ketertiban , Keamanan, dan Kenyamanan Dalam Masyarakat**



Target dan Realisasi Kinerja  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin  
Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA		Capaian Tahun 2016			
		SATUAN	Target	Realisasi	% Rata-rata Capaian
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk	Rasio	1	<b>0,36</b>	36
2	Cakupan Patroli Petugas Sat Pol PP	Rasio	0,7	0.52	74,28

Sasaran 2.....

**Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam Mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**

**Sasaran 2:**





Target dan Realisasi Kinerja  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2016			
	SATUAN	Target	Realisasi	% Rata-rata Capaian
1	2	3	4	5
Penegakkan PERDA	Persen (%)	93	90	96,77

**Sasaran 3: Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya**



Target dan Realisasi Kinerja  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2016			
	SATUAN	Target	Realisasi	% Rata-rata Capaian
1	2	3	4	5
4 Tingkat Sumber Daya Manusia Sat Pol PP terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya	Persen (%)	30	45	150

**Sasaran 4: Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya**

INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2016			
	SATUAN	Target	Realisasi	% Rata-rata Capaian
1	2	3	4	5
4 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan ( K3 )	Persen (%)	96	96	100
5 Cakupan Rasio Perlindungan Masyarakat ( Linmas) di Kabupaten Banyuasin	Persen (%)	1	1	100

Adapun Secara Keseluruhan dari empat ( 4 ) Sasaran dalam Pencapaian dari Enam ( 6 ) Indikator Kinerja Utama (IKU) di Satuan Polisi Pamong



Praja Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang diuraikan dalam analisa capaian adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin  
Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2016				Ket
	SATUAN	Target	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	
1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk	Rasio	1	<b>0.36</b>	36	Perlu penambahan personil
2 Cakupan Patroli Petugas Sat Pol PP	Rasio	0,7	0.52	74,28	Perlu peningkatan
3 Penegakkan PERDA	Persen (%)	93	93,74	100	Mencapai Target
4 Tingkat Sumber Daya Manusia Sat Pol PP terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya	Persen (%)	30	45	150	Mencapai Target
5 Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan keindahan ( K3 ) diKabupaten	Persen (%)	96	96	100	Mencapai Target
6. Cakupan Rasio Perlindungan Masyarakat ( Linmas) Di Kab. Banyuasin	Rasio	'2	'2	100	Mencapai Target
<b>Sumber : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Sat -Pol PP tahun 2016 Pengukuran Kinerja ( PK ) Sat-PolPP tahun 2016</b>					

Keterangan ;

1. Persentase Realisasi indikator Cakupan Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,36 % dari target restra dan Iku yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 1 sehingga Capaian Indikator kinerja ini pada tahun 2016 diperoleh sebesar 17,5 % . Hasil Capaian ini diperoleh dari rumusan :



Jumlah Pegawai Sat POI PP dalam setahun

X 10.000

Jumlah Penduduk dalam setahun



Belum tercapainya indikator ini dikarenakan masih sangat minimnya Pegawai Negeri ( PNS ) Sat-Pol PP Kab. Banyuasin pada tahun 2016 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) pegawai, hal ini tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Kab. Banyuasin pada tahun 2016 sebanyak **892.587** jiwa ( Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh tujuh rupiah ). Untuk mengantisipasi masalah tersebut Kantor Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat analisa Jabatan ( anjab ) untuk menghitung kebutuhan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Untuk itu dalam mengantisipasi hal tersebut, upaya yang dilakukan untuk membantu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sat-Pol PP Kab. Banyuasin didalam Melaksanakan tugasnya Menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dibentuklah Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang anggotanya terdiri dari Tenaga Harian Lepas ( THL ) sebanyak 201 anggota.

2. Persentase Realisasi Capaian Cakupan Patroli Petugas Sat -Pol PP Kab. Banyuasin pada Tahun 2016 sebesar 74,28 % dari pencapaian realisasi pada Tahun 2016 sebesar **0,52 %** , dengan Target capaian pada tahun 2016 sebesar 0,7 %. Kegiatan ini masih belum mencapai target , hal ini dikarenakan;
  - b. Prasarana terbatas untuk menjangkau daerah Kabupaten Banyuasin yang Terdiri dari 19 kecamatan , 10 wilayah kecamatan merupakan daratan, 9 kecamatan wilayah perairan.
  - c. Jumlah Personil Sat-Pol PP Kab. Banyuasin dalam melaksanakan Patroli wilayah Kab. Banyuasin mengalami penurunan pelaksana dari 15 anggota dalam satu kelompok patroli , menjadi 10 anggota dan satu kelompok patroli ,hal itu dikarenakan anggaran untuk kegiatan patroli masih sangat



minim . Untuk mengatasi hal tersebut, ditahun Anggaran 2016, dengan bergabungnya Satuan Perlindungan Masyarakat( linmas ) yang tadinya berada dibawah naungan Badan Kesbangpol Kab. Banyuasin , diharapkan dapat membantu pelaksanaan Patroli wilayah kabupaten di Wilayah Perairan Kecamatan, Kabuapten Banyuasin, agar target indikator Capaian Cakupan Patroli Petugas Sat -Pol PP Kab Banyuasin pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai.

3. **Capaian indikator Penegakan Peraturan Daerah ( PERDA )**, pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 93 %, sedangkan realisasi capaian indicator penegakan peraturan perda ( Perda ) sebanyak 93, 74 % Pencapaian ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan Sat-Pol PP Kab. Banyuasin dan Koordinasi yang baik dengan TNI dan Polri didalam membantu kepala daerah melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah. Untuk Mempertahan hal tersebut, Sat-Pol PP Kabupaten selalu melakukan kegiatan Preventif dan pendekatan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, serta terus melakukan koordinasi yang baik dengan TNI dan POLRI.
4. **Capaian Indikator kinerja untuk Tingkat Sumber Daya Manusia Sat-PolPP terhadap tugas pokok dan Fungsinya** pada tahun 2016 belum mencapai target yang telah ditentukan ( **target 30 %, realisasi 45 %**), hal ini dikarenakan pada tahun 2016 yang diikuti sertakan diksar hanya 31 anggota sedangkan tenaga keamanan dan nyaman lingkungan pada Kantor Sat Pol-PP Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 sebanyak 2016 anggota . Masih minimnya anggota yang mendapatkan pelatihan pendidikan dasar ( diksar ) untuk menunjang indikator tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran. Pelatihan Diksar tersebut dilaksanakan di Yon- Zikon, Langkan Banyuasin III, dan melibatkan instruktur dari Yon –Zikon didalam memberikan pelatihan fisik dan mental serta ilmu dasar Sumber Daya Manuasi (SDM ) sebagai anggota Pelaksana Tenaga Kegiatan Penyiapan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, sehingga pada tahun 2016 , diperoleh hasil capaian indikator sebesar 34.22 %

☀ Hasil Capaian ini diperoleh dari rumusan ;





Jumlah sat polpp yang mendapat pelatihan diklatsar dalam setahun

X 100

Jumlah Anggota Sat Pol PP dalam setahun

5. **Capaian Indikator Penyelesaian Ketertiban, Keindahan ( K3 ) di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2015 sebesar 100 %**, dimana target indikator penyelesaian Ketertiban, Ketentraman, Keindahan ( K3) di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 sebesar 96 % dengan realisasi capaian tahun 2016 sebesar 96 %.

☀ Hasil Capaian ini diperoleh dari rumusan ;



$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian K3 ( 15 Kali )}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 ( 17 Kali )}} \times 100$$

6. **Capaian Indikator Rasio Perlindungan Masyarakat** di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2015 sebesar 1 rasio, dimana target indikator ini ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 1 Rasio dengan realisasi capaian tahun 2016 sebesar 100 %, hal ini menunjukkan bahwa disetiap Kecamatan ( RT/RW ) Kabupaten Banyuasin, telah tersedianya aparatuar Linmas sebanyak 1 personil dalam melaksanakan perlindungan masyarakat desa dalam bentuk siskamling.

## B. Metodologi Pengukuran Kinerja

### a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realiasi, dengan perhitungan sebagai berikut :

#### a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:



- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Kinerja Rencana}} \times 100$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RPJMD.

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- X ≥ 85 % : Sangat Berhasil**
- 70 % ≤ X < 85 % : Berhasil**
- 55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil**
- X ≤ 55% : Tidak Berhasil**



Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

### C. Analisis Capaian Kinerja

#### Analisis Capaian Kinerja SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin disusun dengan mengacu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten. Adapun Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Tahun 2016 yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dan diuraikan dari tabel –tabel seperti yang tertera dibawah ini :



**Tabel 3.2.**

**Perbandingan Realisasi Kinerja  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin  
Tahun Anggaran 2016 dengan Tahun 2015**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		Ket	% Capaian
			TH 2015	TH 2016		
1	2	3			7	
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk	Rasio	0,4	0,36	Naik	90
2	Cakupan Patroli Petugas Sat Pol PP	Rasio	0.5	0,52	Stabil	100
3	Penegakkan PERDA	%	90	93	Meningkat (tercapai)	96,74
4	Tingkat Sumber Daya Manusia Sat Pol PP terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya	%	18	15,	Meningkat	120





				4	(tercapai)	
5	Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan keindahan ( K3 ) diKabupaten	%	0	96	Belum bias dibandingkan, karena pada tahun 2014 indikator ini belum ada direnstra, PK, Renja	0
6	Cakupan Rasio Perlindungan Masyarakat ( Linmas) Di Kab. Banyuasin	Rasio	0	2	Belum bias dibandingkan, karena pada tahun 2014 indikator ini belum ada direnstra, PK, Renja	0

Keterangan ;

1. Persentase Realisasi kinerja indikator Cakupan Rasio Jumlah Polisi PamongPraja Per 10.000 penduduk pada tahun 2016 sebesar 15,4 % dan tahun 2015 yaitu sebesar 0,36% , sehingga Capaian Indikator kinerja ini diperoleh nilai sebesar 90 %. Jika dibandingkan , capaian indaktor cakupan rasio jumlah sat pol-pp pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,1 % hal ini dikarenakan jumlah PNS Sat Pol-PP pada tahun 2016 ( 33 PNS )mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2015 ( 35 PNS ).
2. Persentase Realisasi kinerja indikator Cakupan Patroli pada tahun 2016 sebesar 0,5 % dan tahun 2014 yaitu sebesar 0,5% , sehingga Capaian Indikator kinerja ini diperoleh nilai sebesar 100 %.
3. Capaian **indikator Penegakan Peraturan Daerah ( PERDA )** , pada tahun 2016 sebesar 93 % , sedangkan realisasi capaian indikator penegakan peraturan perda ( Perda ) sebanyak 93,%. Sehingga diperoleh Capaian penegak perda sebesar 100 %.Keberhasilan indikator ini didukung oleh kerjasama yang baik antara



masyaraankat dan Sat-Pol PP Kab. Banyuasin dan Koordinasi yang baik dengan TNI dan Polri didalam membantu kepala daerah melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah. Untuk Mempertahan hal tersebut, Sat-Pol PP Kabupaten selalu melakukan kegiatan Presventif dan pendekatan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, serta terus melakukan koodinasi yang baik dengan TNI dan POLRI.

4. Capaian Indikator Sat Pol-PP terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya , pada tahun 2016 mengalami penurunan . Capaian pada tahun 2016 sebesar 15, 4 %, pada tahun 2015 diperoleh capain 18 %. Penurunan capaian ini dikarenakan hal ini dikarenakan pada tahun 2016 masih banyaknya anggota Sat-Pol-PP yang melaksanakan kegiatan tenaga keamanan dan kenyamanan belum bisa diikuti sertakan pelatihan pendidikan yang melibatkan tenaga TNI Yon Zikon Kab Banyuasin, dikarenakan keterbatasan anggaran .
5. **Capaian Indikator Penyelesaian Ketertiban, Keindahan ( K3 ) di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 belum bisa dibandingkan, karena indikator ini baru dilaksanakan program kerja dan kegiatannya pada tahun 2016 dengan realisasi 96 %, sedangkan pada tahun 2016 belum dilaksanakan sehingga reliasasinya belum bias diukur .**
6. **Capaian Indikator Rasio Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 sebesar 1 rasio, indikator ini belum bisa dibandingkan, karena indikator ini baru dilaksanakan program kerja dan kegiatannya pada tahun 2016 dengan realisasi 96 %, sedangkan pada tahun 2015 belum dilaksanakan sehingga reliasasinya belum bisa diukur.**

**Tabel. 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin**  
**Tahun 2016 dengan target akhir RPJMD ( akhir tahun 2018 )**

INDIKATOR KINERJA	Capaian			Persentase
	Satuan	Realisasi Target		Capaian
		2016	2018	
1	2	4	5	6



1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk	Rasio	<b>0,36</b>	2,07	17,39
2.	Cakupan Patroli Petugas Sat Pol PP	Rasio	0,52	0.9	57,7
3.	Penegakkan PERDA	(%)	93	99	93,93
4.	Tingkat Sumber Daya Manusia Sat Pol PP terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya	(%)	15,4	90	17,11
5.	Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan keindahan ( K3 ) diKabupaten Banyuwangi	%	96	97	96,9
6.	Cakupan Rasio Perlindungan Masyarakat ( Linmas) Di Kab. Banyuwangi	Rasio	2	2	100

Sumber :-Renstra 2014-2018

- PK 2015 ( Pengukuran Kinerja )

### C Penjelasan Tabel 3.3

- . **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini (2016 ) dibanding dengan Target Akhir RPJMD ( 2018 )**



- Perbandingan capaian indikator Penegak Perda** Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 sebesar diperoleh Realisasi sebesar 0,36 dibandingkan dengan target RPJMD ( 2018) sebesar yaitu sebesar 2, 07 sehingga diperoleh capaian 17, 39%.
- Perbandingan capaian indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** pada tahun 2016 sebesar 0,52 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD ( 2018) sebesar 57,7 %.
- Perbandingan Capaian indikator Penegakan Peraturan Daerah ( PERDA )**, pada tahun 2016 diperoleh realisasi 93 %, sedangkan target capaian indikator penegakan peraturan perda pada akhir tahun RPJMD ( 2018 ) 99,%.sehingga diperoleh capaian 93,93 %.
- Perbandingan Capaian indikator Tingkat Sumber Daya Sat Pol-PP terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya** pada tahun 2016 sebesar 96 %, sedangkan target akhir RPJMD ( 2018 ) sebesar 97 % sehingga diperoleh capaian 96,9 %.
- Perbandingan Capaian indikator Cakupan Perlindungan Masyarakat** pada tahun 2016 sebesar 2 rasio, sedangkan target akhir RPJMD ( 2018 ) sebesar 2 rasio sehingga diperoleh capaian 100 %.



**Tabel. 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan Standar Nasional ( SPM )**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten**

INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2016			Pesentase Capaian	Ket	
	Satuan					
		Standar Nasional SPM 2016	Realisasi 2016	%		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	%	100	100	100	Mencapai Target
2	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rasio	3 x Patroli dalam sehari	3 x Patroli dalam sehari	3 x Patroli dalam sehari	Sesuai Dengan Standar SPM
3	Cakupan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Banyuasin	Rasio	1 Aparatur Linmas di setiap RT	1	0,7	Mencapai Standar SPM
Sumber : Standar Pelayanan Minimal Sat Pol PP Tahun 2015						

### C Penjelasan Tabel 3.4

- . **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini (2016) dibanding dengan Target Nasional ( SPM ) sebagai berikut :**



- f. **Perbandingan capaian indikator Penegak Perda** Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 sebesar 100% telah memenuhi target nasional Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yaitu sebesar 100 %. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan indikator Penegakan Perda ini Sat Pol PP Kab Oberpedoman pada ketentuan SPM yang telah ditetapkan dalam Permendagri PP 62 Tahun 2012 dimana disana tertera rumusan indikator dan metode dan langkah-langkah kerja kegiatan , agar kegiatan yang telah di rencanaan dapat terarah dan tercapai.



- g. **Perbandingan capaian indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** pada tahun 2016 dibandingkan dengan Target Pencapaian Nasional( SPM ) telah Mengikuti Pedoman yang ada didalam SPM yang diatur pada Permendagri 62 Tahun 2012 yaitu 3 (tiga) x Kelompok Patroli dalam sehari yang melakukan kegiatan siaga ketertiban umum dalam melaksanakan patroli wilayah ( Kabupaten Banyuasin ) .Selain itu untuk Indikator SPM cakupan Rasio Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) di Kabupaten Banyuasin telah memenuhi standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan yaitu telah tersedianya 1 personil linmas didalam 1 ( satu ) RT/RW di Kabupaten Banyuasin didalam menjaga ketentraman dan perlindungan masyarakat diwilayah desa.

**D.Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Aternative Solusi yang telah dilaksanakan**

**Sasaran 1: Meningkatkan Ketertiban , Keamanan, dan Kenyamanan Dalam Masyarakat**

1. **Realisasi Capaian indikator** Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk telah men
2. **Realisasi Cakupan Patroli Petugas Sat Pol PP Kab.Banyuasin telah mencapai target**

**Sasaran 2: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam Mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**

1. **Penegakan PERDA telah mencapitarget yang telah ditentukan yaitu**  
.....

**Sasaran 3: Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Tingkat Sumber Daya Manusia Sat Pol-PP Kab. Banyuasin Terhadap Tugas Pokok dan a telah.....)**

**Sasaran 4: Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya**



**1. Capaian Indikator Penyelesaian Ketertiban, Keindahan ( K3 ) di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2015 sebesar 100 %, dimana target indikator penyelesaian Ketertiban, Ketentraman, Keindahan ( K3 ) di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 sebesar 96 % dengan realisasi capaian tahun 2016 sebesar 96 %.**

**2. Capaian Indikator Rasio Perlindungan Masyarakat** di Kabupaten Banyuasin **pada tahun 2015 sebesar 1 rasio, dimana target indikator ini ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 1 Rasio dengan realisasi capaian tahun 2016 sebesar 100 %**, hal ini menunjukkan bahwa disetiap Kecamatan ( RT/RW ) Kabupaten Banyuasin, telah tersedianya aparatuar Linmas sebanyak 1 personil dalam melaksanakan perlindungan masyarakat desa dalam bentuk siskamling

#### **D. Akuntabilitas Keuangan**

---



Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2016 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran Belanja Langsung adalah sebesar Rp. **7.816.131.236,-** - dengan realisasi sebesar Rp 7.566.718.997 atau sebesar 98,781 % dan belanja tidak langsung ( Gaji ) sebesar Rp. 1.796.004.000- realisasi belanja tidak langsung ( Gaji pada tahun 2016 ) sebesar Rp. 1.754.001.756,- atau sebesar 97,66 %, dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp)	REALIASI ( %)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran untuk operasional kantor	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.932.000,-	1.932.000,-	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	4.080.000,-	3.115.395,-	76,35
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	14.168.925	13.944.000,-	100
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	557.864.000,-	556.634.000,-	99,78
		Penyediaan Jasa kebersihan kantor	22.945.887	22.945.887,-	100
		Penyediaan Alat tulis kantor Kantor	25.259.100	25.259.100,-	90,88
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	35.117.500,-	35.057.950,-	99,83
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.516.245,-	199.000.000,-	99,74
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	21.168.000,-	21,168.000,-	100
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	487.097.600	487.097.600	100



		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	155.350.000,-	154.610.101	99,52
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	60.990.675	60.375.000,-	98,99
2.	Peningkatan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasi keamanan dan ketertiban lingkungan	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1.387.000.000,-	1.159.987.500	83,63
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas dan Operasional	469.820.000,-	469.820.000,-	100
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	26.120.000,-	25.910.000,-	99,20
3.		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
		Pengadaan Pakain Dinas pakaian khusus hari-hari tertentu	192.480.000,-	192.480.000,-	100
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	157.950.000,-	157.950.000,-	100
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi	59.250.000,-	59.250.000,-	100





		Kinerja			
4.	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman yang kondusif	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>			
		Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.608.800.000,-	2.608.800.000,-	100
		Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Kegiatan Masyarakat	74.700.000,-	74.700.000,-	100
		Penertiban Hewan Ternak Kaki 4(empat)	24.100.000,-	24.100.000,-	100
		Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	48.600.000,-	48.600.000,-	100
		Penertiban izin usaha	40.600.000,-	40.600.000,-	100
		Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	54.240.000,-	54.240.000,-	100
		Pengamanan dan Pegawalan Pejabat	91.700.000,-	91.700.000,-	100
		Patroli Lingkungan	266.400.000	266.400.000	100
				<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	
		Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	112.500.000,-	112.500.000,-	100
		Pembinaan Fisik (Binsik) Sat Pol PP Kab. Banyuwangi	67.560.000,-	67.560.000,-	100
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)</b>			



		Penertiban Penyebaran Penyakit Masyarakat	40.400.000,-	40.400.000,-	100
5.		Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait Melalui Operasi Yustisi	36.000.000,-	36.000.000,-	100
	Membentuk aparatur yang berwawasan serta mempunyai kemampuan memahami pekerjaan dalam melaksanakan tugas	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</b>			
		kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Linmas Kab.Banyuasin dalam Memperdayakan Masyarakat Untuk Pemeliharaan Trantibun	47.295.000	47.295.000	100
		Pembinaan Siskamling	76.449.004	76.449.004	100
		Kegiatan Pembinaan Sat Linmas Kab. Banyuasin dalam Pengamanan Situasi Lingkungan Darurat dan Siaga Bencana	54.222.500	<b>54.222.500</b>	100
		<b>JUMLAH</b>	7.816.131.236	7.566.718.997	96,81

Sumber Data : Laporan Monitoring Evaluasi Kegiatan ( Monev) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin Tahun 2016





## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin Tahun 2015, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program Kegiatan sesuai dengan instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara no 329/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan kebijakan yang jelas serta menggunakan strategi yang tepat dengan cara-cara mencapai tujuan dan sasaran yang tepat, akan mempermudah untuk mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tahun Anggaran 2016

Terlepas dari keberhasilan yang sudah diuraikan pada BAB III, kegagalan yang ada perlu segera ditindak lanjuti dengan mencari pemecahan permasalahannya dan segera mengambil kebijakan untuk mensikapi kendala utama untuk memperbaiki kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, pada tahun yang akan datang.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAPKIN) dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 dibuat sebagai bahan evaluasi program kerja pada tahun yang akan datang, sehingga pelaksanaan kegiatan selanjutnya senantiasa mendapat perkembangan secara berkesinambungan.

Pangkalan Balai, Februari 2017

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Banyuasin,

Drs Anthony Liando, S.Sos.M.Si  
Pembina TK.I  
Nip. 19740108 199302 1 002



# L A M P I R A N